

LAPORAN



HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI KELAS II JANUARI 2020

**PRIODE PERTAMA
TAHUN 2020**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI JANUARI 2019 DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Disahkan di Pangkalan Balai
Pada Hari Senin, 29 Januari 2020

Ketua Tim Survei,



YUSUF, S.H.
NIP. 196411281985031005

Megetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,



YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.
NIP. 19781113 200212 1 002

DAFTAR ISI

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud Dan Tujuan 2

1.3. Landasan Hukum 2

1.4. Rencana Kerja 2

BAB II 4

METODOLOGI 4

2.1. Metode Penelitian 4

2.2. Populasi Dan Sampel 4

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis 4

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control 4

2.5. Teknik Analisis Data 5

2.6. Tahapan pelaksanaan 6

BAB III 8

INDEKS PERSEPSI KORUPSI 8

3.1. Profil responden 8

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator 12

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan 22

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan 23

BAB IV 24

PENUTUP 24

4.1. Kesimpulan 24

4.2. Rekomendasi 24

LAMPIRAN 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa

persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa

wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 14 Januari – 17 Januari 2020 dan data disebar 60 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana sejumlah 45 responden dari 60 responden yang disebar.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim pengawas/Penanggunjawab survei akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

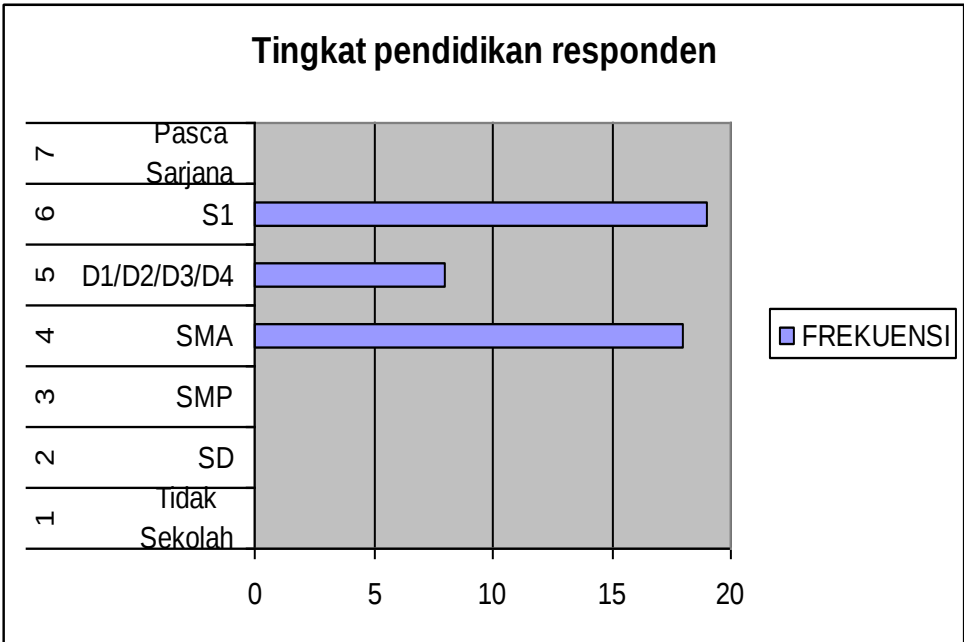
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II mayoritas memiliki latar Starata 1 (S1) sebanyak 19 (42,4%) responden.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	0	0
4	SMA	18	40
5	D1/D2/D3/D4	8	17.78
6	S1	19	42,4
7	Pasca Sarjana	0	0
JUMLAH		45	100

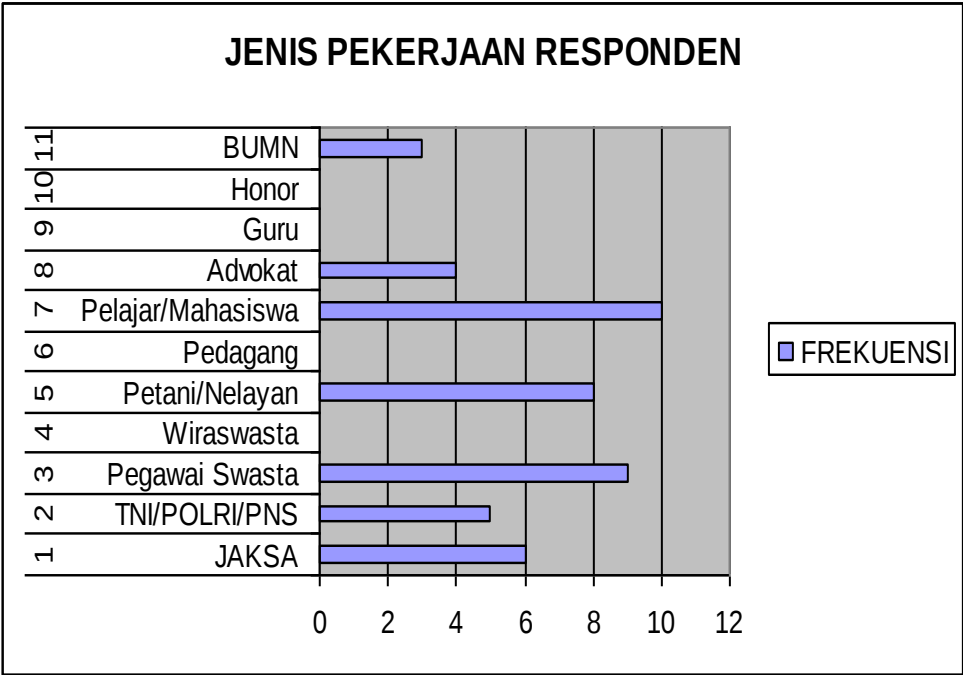


3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 10 (22,2%) responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II memiliki pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa.

Tabel 5.
JENIS PEKERJAAN RESPONDEN

NO	PEKERJAAN UTAMA	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	JAKSA	6	13,4
2	TNI/POLRI/PNS	5	11,1
3	Pegawai Swasta	9	20
4	Wiraswasta	0	0
5	Petani/Nelayan	8	17,8
6	Pedagang	0	0
7	Pelajar/Mahasiswa	10	22,2
8	Advokat	4	8,9
9	Guru	0	0
10	Honor	0	0
11	BUMN	3	6,6
JUMLAH		45	100



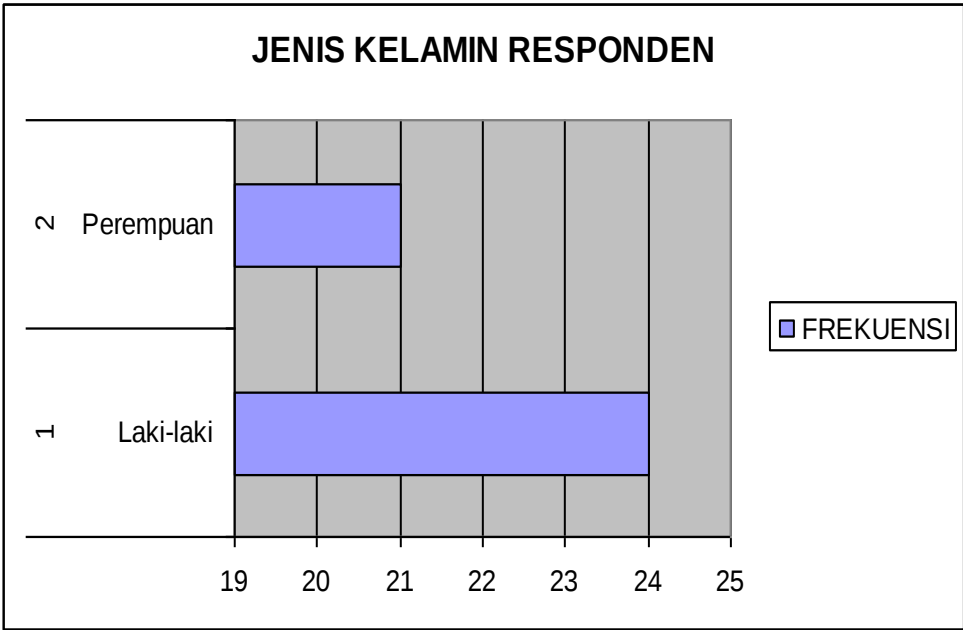
3.1.3. Jenis Kelamin

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar jenis kelamin, responden paling banyak jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 24 (53.33%) responden.

Tabel 6

Jenis Kelamin Responden

NO	Jenis Kelamin	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Laki-laki	24	53,33
2	Perempuan	21	46,66
JUMLAH		45	100

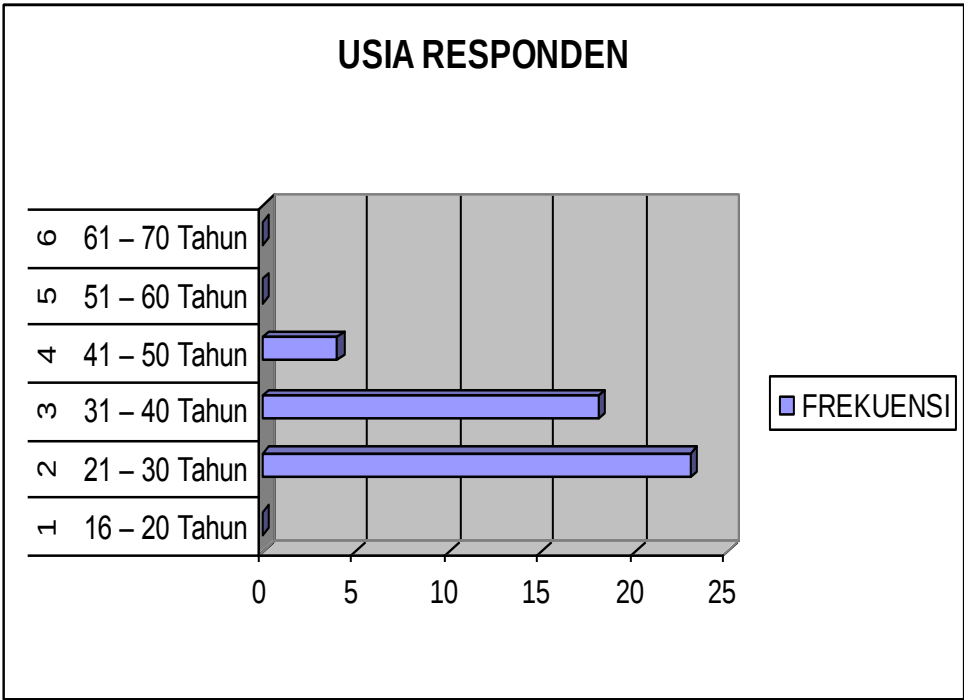


3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia yaitu pada usia antara 21 tahun s/d 30 tahun dengan jumlah 23 (51,11%) responden.

Tabel 7.
USIA RESPONDEN

NO	UMUR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1.	16 – 20 Tahun	0	0
2.	21 – 30 Tahun	23	51,11
3.	31 – 40 Tahun	18	40
4.	41 – 50 Tahun	4	8.88
5.	51 – 60 Tahun	0	0
6.	61 – 70 Tahun	0	0
Jumlah		45	100



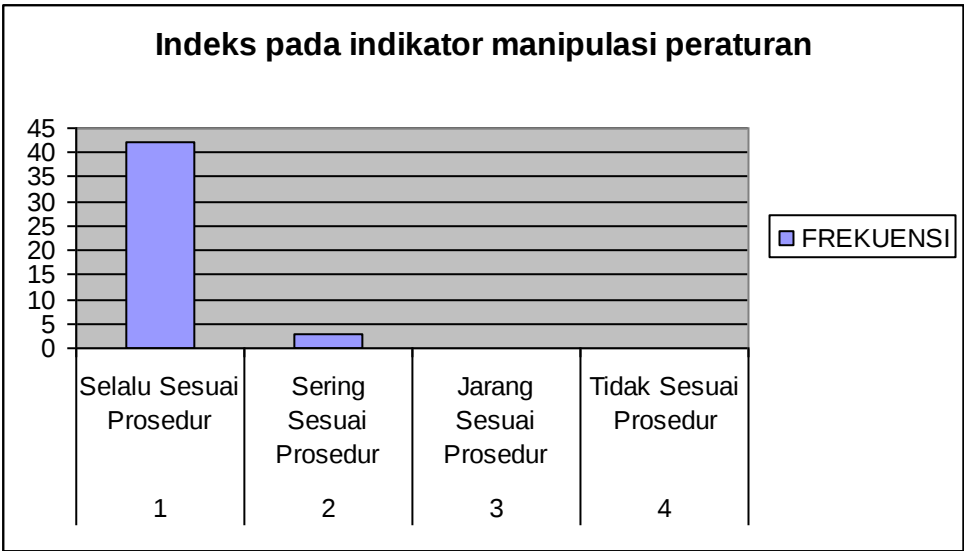
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“42 (93,33%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Selalu Sesuai Dengan Prosedur (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“3,93”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 9.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu Sesuai Prosedur	A	4	42	93,33
2	Sering Sesuai Prosedur	B	3	3	6,66
3	Jarang Sesuai Prosedur	C	2	0	0
4	Tidak Sesuai Prosedur	D	1	0	0
JUMLAH				45	100

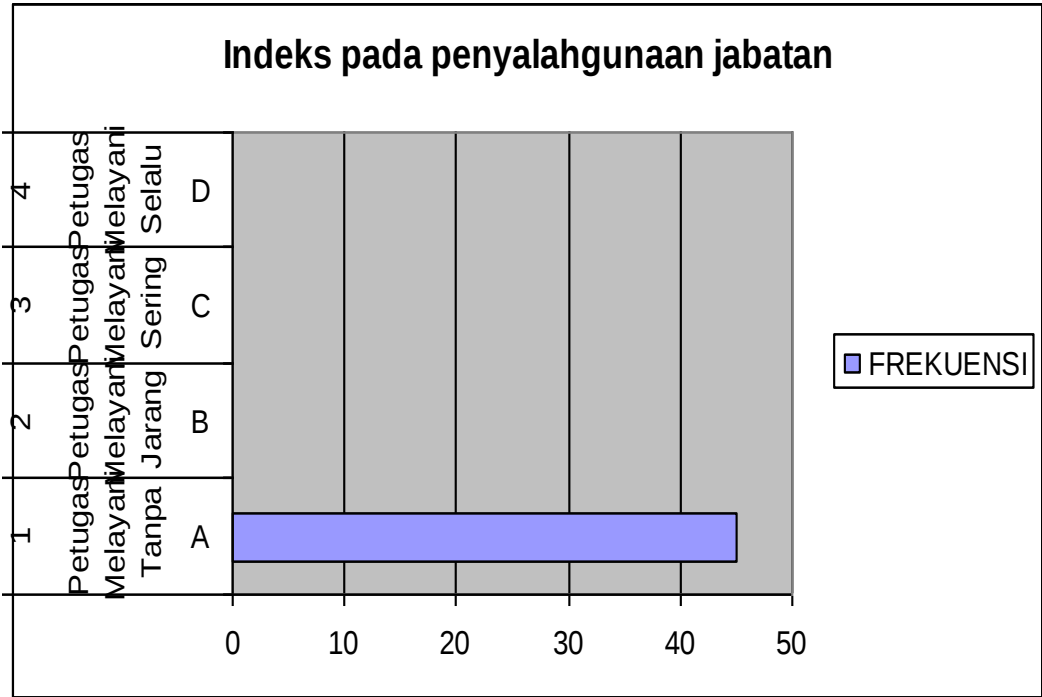


3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“45 (100%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“4”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 10.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	A	4	45	100
2	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	B	3	0	0
3	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	C	2	0	0
4	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	D	1	0	0
JUMLAH				45	100

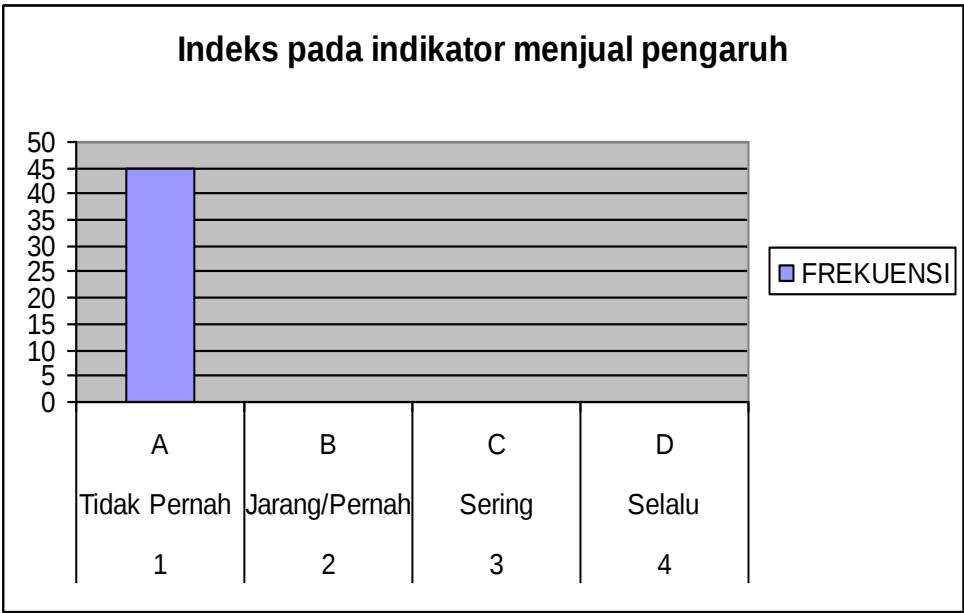


3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“45 (100%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Pernah (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“4”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”,** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 11.
Indeks pada indikator menjual pengaruh

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Pernah	A	4	45	100
2	Jarang/Pernah	B	3	0	0
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				45	100

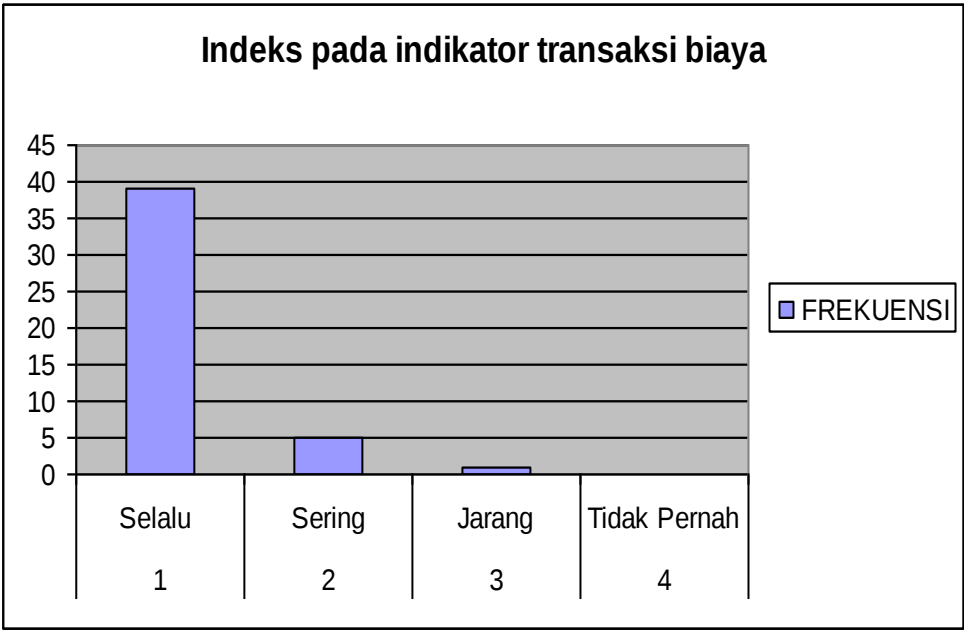


3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“39 (86,66%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Selalu (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“3,84”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 12.
Indeks pada indikator transaksi biaya

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	39	86,66
2	Sering	B	3	5	11,11
3	Jarang	C	2	1	2,22
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
JUMLAH				45	100

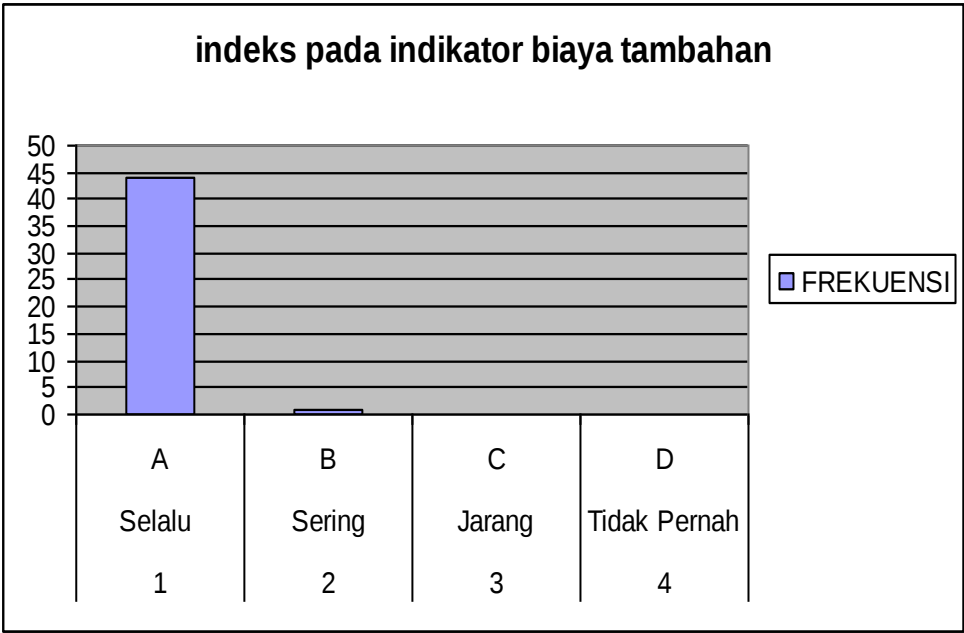


3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“44 (97,7%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Selalu (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“3,98”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 13.
Tabel indeks pada indikator biaya tambahan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	44	97,77
2	Sering	B	3	1	2,22
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
JUMLAH				45	100

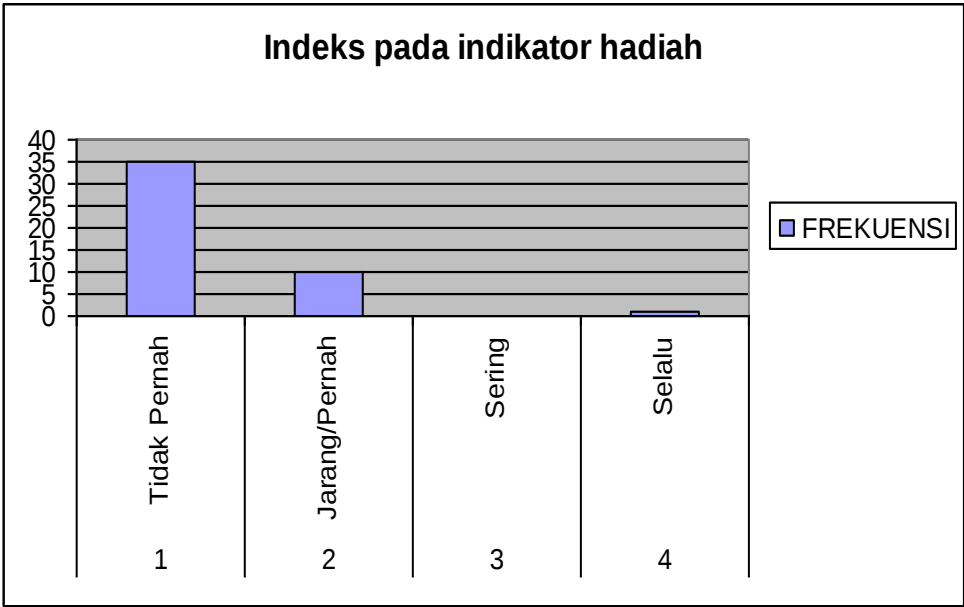


3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“35 (77,77%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Pernah (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“3,78”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 14.
Indeks pada indikator hadiah

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Pernah	A	4	35	77,77
2	Jarang/Pernah	B	3	10	22,22
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	1	2,22
JUMLAH				45	100

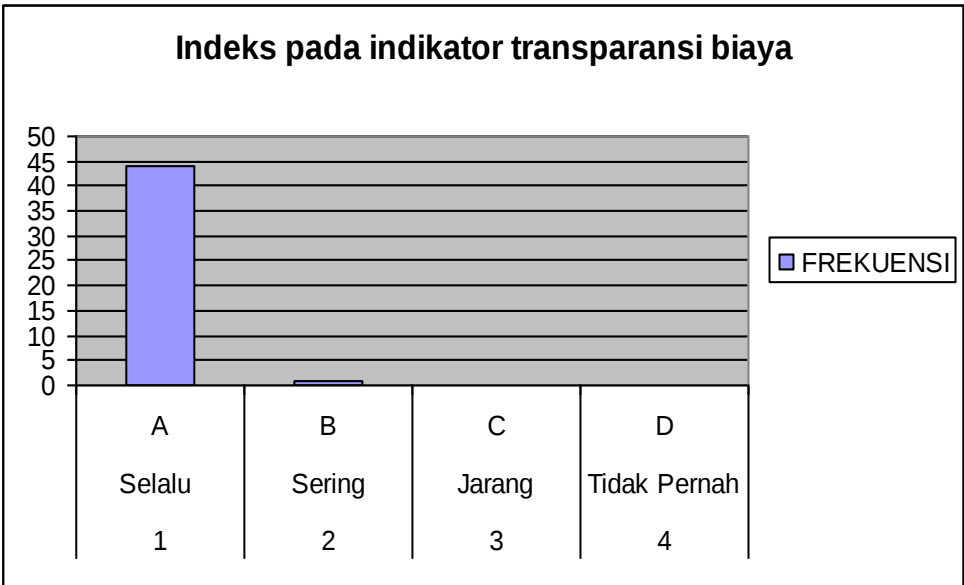


3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“44 (97,7%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Selalu (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“3,98”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 15.
Indeks pada indikator transparansi biaya

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	44	97,77
2	Sering	B	3	1	2,22
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
JUMLAH				45	100

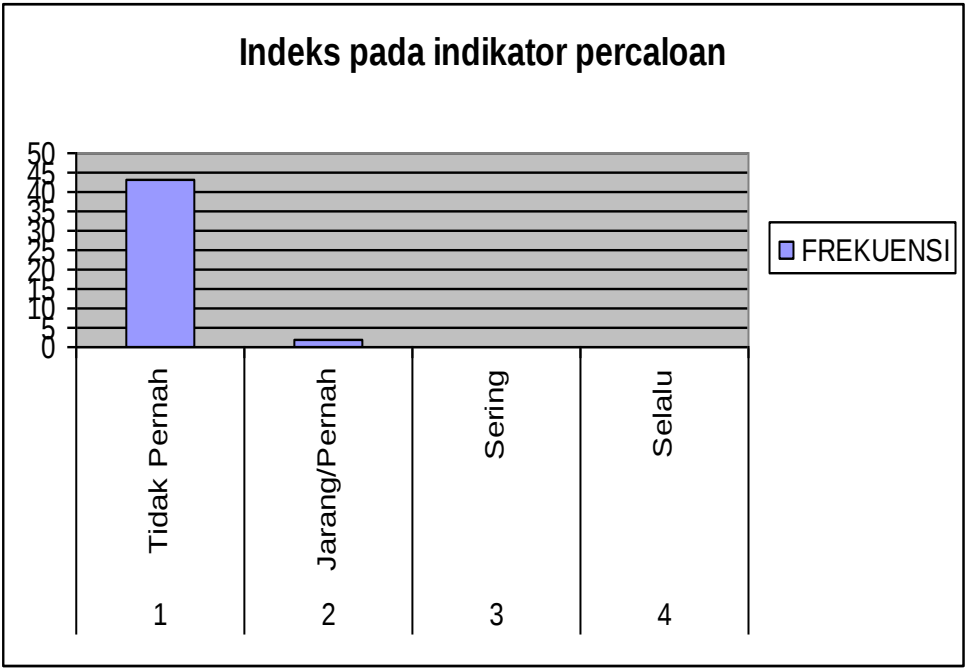


3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan Pembayaran ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“43 (95,55%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Pernah (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“3,96”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”,** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 16.
Indeks pada indikator percaloan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Pernah	A	4	43	95,55
2	Jarang/Pernah	B	3	2	6,66
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				45	100

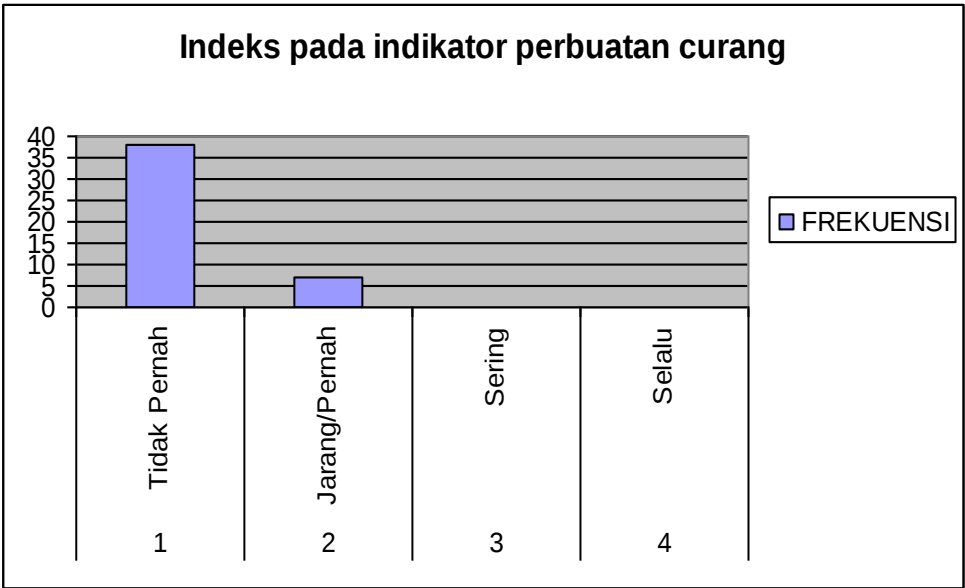


3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“38 (84,44%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Pernah (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“3,84”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”,** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 17.
Indeks pada indikator perbuatan curang

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Pernah	A	4	38	84,44
2	Jarang/Pernah	B	3	7	5,55
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				45	100

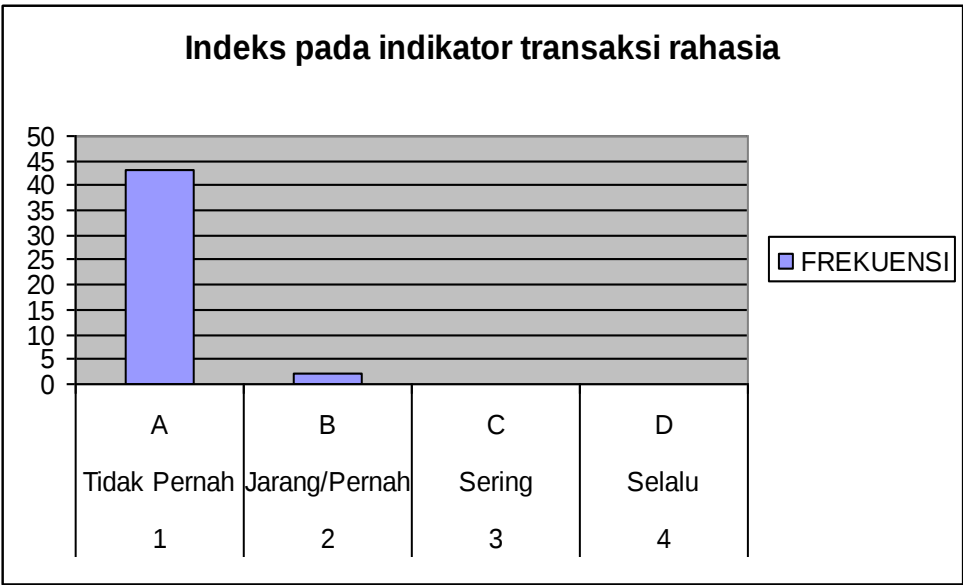


3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“43 (95,55%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Pernah (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“3,96”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 18.
Indeks pada indikator transaksi rahasia

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Pernah	A	4	43	95,55
2	Jarang/Pernah	B	3	2	4,44
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				45	100



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II sebesar “98,25”.

Tabel 19.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II

NO	RUANG LINGKUP	SKOR RATA - RATA	SKOR RATA – RATA TERTIMBANG	KATEGORI
1	Manipulasi Peraturan	3.93	0.39	Bersih dari korupsi
2	Penyalahgunaan	4,00	0.40	Bersih dari korupsi
3	Menjual Pengaruh	4,00	0.40	Bersih dari korupsi
4	Transaksi Biaya	3.84	0.38	Bersih dari korupsi
5	Biaya Tambahan	3.98	0.40	Bersih dari korupsi
6	Hadiah	3.78	0.38	Bersih dari korupsi
7	Transparansi Biaya	3.98	0.40	Bersih dari korupsi
8	Percaloan	3.96	0.40	Bersih dari korupsi
9	Perbuatan Curang	3.84	0.38	Bersih dari korupsi
10	Transaksi Rahasia	3.96	0.40	Bersih dari korupsi
Jumlah Skor Rata – Rata Tertimbang			3.93	
IPK			3.92 x 25 = 98,25	

Indeks “98,25” tersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan “BERSIH DARI KORUPSI”. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka “81.26 – 100.00”

Tabel 20.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II
1	-
2	-
3	-
4	-
5	-

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi **“98,25”** atau masuk pada kategori **“Bersih Dari Korupsi”**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,93 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,84 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,98 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,78 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,98 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,96 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,84 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,96 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II Tahun 2019 tersebut di atas,

menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks dengan persepsi kategori Bersih Dari Korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Hadiah dan Perbuatan Curang** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN

PENGELOLAAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Respo nden	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN										Ket.
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	

29	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
34	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4		
35	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4		
36	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4		
37	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4		
38	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4		
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
41	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4		
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
44	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	177	180	180	173	179	170	179	178	173	178		
N.Rata-rata	3.93	4.00	4.00	3.84	3.98	3.78	3.98	3.96	3.84	3.96		
												1
NRR Tertimbang	0.40	0.40	0.40	0.38	0.39	0.38	0.40	0.40	0.38	0.40	3.93	10
												0.1



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NOMOR : W6-U10/7 / KP.04.6 / I / 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
TAHUN 2020**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk menuju wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah bersih melayani dilingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka dipandang perlu dilaksanakan Survei Persepsi Korupsi;
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Mencegah Tahun 2012-2014;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Survei Persepsi Korupsi tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tim Survei Persepsi Korupsi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bertugas :
a. menyusun, menyiapkan dan membagikan bahan kuesioner;
b. mengolah, memverifikasi hasil isian kuesioner dari masyarakat;
c. membuat laporan pengukuran indeks kepuasan pelayanan;
d. melaporkan hasil pelaksanaan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 8 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.
NIP. 19781113 2002012 1 002

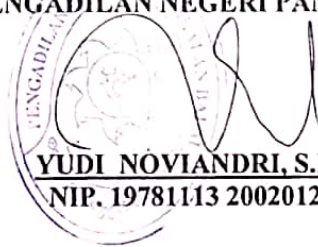
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Nomor : W6-U10 / / KP.04.06 / I /2020
Tanggal : 8 Januari 2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
TAHUN 2020**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	
			JABATAN	TIM
1.	2.	3.	4.	5.
1.	BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H. NIP. 19880620 201101 1 006	Penata Muda Tk. I / (III/b)	Hakim Pratama Muda	PENANGGUNG JAWAB
2.	YUSUF NIP. 19641128 198503 1 005	Penata Tk. I / (III/d)	PANITERA	KETUA TIM SURVEI PERSEPSI KORUPSI
3.	KHOIRUL MUNAWAR, S.T, S.H., M.H. NIP. 19791409 200502 1 001	Penata Tk. I/ (III/d)	PANITERA MUDA HUKUM	SEKRETARIS TIM SURVEI PERSEPSI KORUPSI
4.	R. A. MARISKA DEWI, S.H. NIP. 19900316 201403 2 003	Penata Muda/ (III/a)	STAF KEPANITERAAN HUKUM	ANGGOTA TIM SURVEI PERSEPSI KORUPSI
5.	FAISAL RIFA'I	---	HONORER	ANGGOTA TIM SURVEI PERSEPSI KORUPSI

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 8 Januari 2020

 **KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI** 


YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.
NIP. 19781113 2002012 1 002



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

JL. HM. ASYIK AQIL KM 16 KELURAHAN SUKAJADI KEC. TALANG KELAPA

TELP. (0711) 5720800 FAX. (0735) 5720800

BANYUASIN

Pangkalan Balai, 10 Januari 2020

Kepada Yth:
Tim Survei
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
PN Pangkalan Balai

Perihal : Rapat Persiapan Survei di- Tempat

Sehubungan dengan SK Ketua Pengadilan Pangkalan Balai Nomor W6-U10/7/KP.04.6/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2020, dengan ini mengundang seluruh anggota tim tersebut untuk menghadiri rapat yang akan di laksanakan pada :

Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Januari 2020
Waktu	: 09.00 s/d Selesai
Tempat	: Ruang Sidang Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Acara	: Rapat persiapan pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalan.

Demikian, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PENANGGUNG JAWAB TIM SURVEI

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.
NIP. 19880620 201101 1 006

NOTULEN RAPAT
Persiapan Pelaksanaan Indeks Persepsi Korupsi
pada Pengadilan Negeri Pangkalan
Hari Senin, Tanggal 13 Januari 2020

Hasil rapat sebagai berikut:

1. Bahwa Jadwal Pelaksanaan Indeks Persepsi Korupsi:

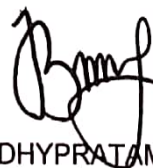
1. Persiapan : 13 – 14 Januari 2020
2. Pengumpulan Data / Survei IPK : 14 Januari – 17 Januari 2020
3. Pengolahan Data : 20 – 23 Januari 2020
4. Penyusunan dan Pelaporan : 23 – 29 Januari 2020

2. Bahwa Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan:

1. Tim survei membuat instrument berupa kuisisioner sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
2. Menentukan responden untuk disebar 55 responden.
3. Agar Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
4. Kuisisioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas diserahkan kepada ketua tim survei.
5. Tim survei menganalisa kuisisioner yang sudah terisi.
6. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk tabel, diagram dan deskriptif.
7. Hasil analisa diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

3. Dalam survei di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ini, seluruh unsur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diharapkan hasil yang baik dari survei yang dilaksanakan.

PENANGGUNG JAWAB
TIM SURVEI



BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

**KUESIONER SURVEI INDEKS PRESEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
BULAN JANUARI TAHUN 2020**

Nomor Kuesioner : (diisi oleh Petugas)

Tanggal Survei : 20-01-2020.

PROFIL RESPONDEN

Usia : 35 tahun

Jenis Kelamin : ☒ L ☐ P

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ D1/D3

☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

Pekerjaan : ☐ Jaksa ☐ Polri ☐ Advokat ☐ PNS

☐ Dosen/Pengajar ☐ Mahasiswa/Pelajar ☐ Swasta

☒ Petani/Pekebun ☐ Pedagang ☐ Wiraswasta

☐ Lainnya : (sebutkan)

PETUNJUK :

Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara dan betul - betul untuk kepentingan ilmiah.

Cara pengisian Kuesioner

Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (x), Atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

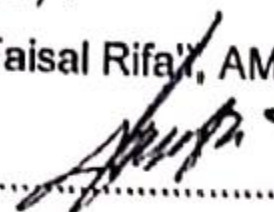
KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)	JAWABAN
(1)	(2)
1. Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	☒ a. Selalu sesuai prosedur b. Sering sesuai prosedur c. Jarang sesuai prosedur d. Tidak sesuai prosedur
2. Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	☒ a. Petugas melayani tanpa meminta imbalan b. Petugas melayani jarang meminta imbalan c. Petugas melayani sering meminta imbalan d. Petugas melayani selalu meminta imbalan
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?	☒ a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan?	a. Selalu ☒ b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
5. Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	☒ a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ?	a. Tidak Pernah ☒ b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan?	☒ a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah
Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan?	☒ a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan?	a. Tidak Pernah ☒ b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
Apakah pernah mengurus perkara melalui	☒ a. Tidak Pernah

**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
BULAN JANUARI
TAHUN 2020**

PETUGAS PELAKSANA :

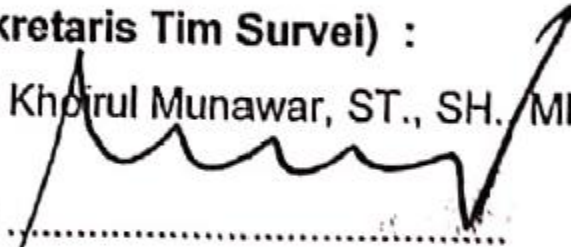
1. Petugas (Anggota Tim Survei) :

- Nama : Faisal Rifal, AMd
- Tanda Tangan : 
- Tanggal Pelaksana : 14 Januari – 17 Januari 2020

2. Pencacah/Penghitung hasil survei (Anggota Tim Survei):

- Nama : R.A. Mariska Dewi, SH
- Tanda Tangan : 
- Tanggal Pelaksana : 14 Januari – 17 Januari 2020

3. Pengawas/Pemeriksa (Sekretaris Tim Survei) :

- Nama : Khoirul Munawar, ST., SH., MH
- Tanda Tangan : 
- Tanggal Pelaksana : 14 Januari – 17 Januari 2020